



Implementasi Program Satu Kartu Keluarga Satu Sarjana: Upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam Mendukung Pendidikan Berkualitas

Salma Shadiyah¹, Zahra Salsa Billa², Hellen Qurotul Nurassifa³, Anggita Nanda Ayu Kusuma⁴, Anggi Ayu Wulandari⁵, Tjijik Rahayu⁶, Ardiyansah⁷

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia¹⁻⁷

Email Korespondensi: 24040674167@mhs.unesa.ac.id · 24040674135@mhs.unesa.ac.id · 24040674137@mhs.unesa.ac.id · 24040674146@mhs.unesa.ac.id · 24040674150@mhs.unesa.ac.id, tjijikrahayu@unesa.ac.id, ardiyansah@unesa.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 13 Mei 2026

ABSTRACT

Access to higher education remains one of the main challenges in human resource development, particularly for low-income communities in urban areas. This study aims to analyze the implementation of the One Family One Bachelor Program in Surabaya as an effort to improve access to higher education for economically disadvantaged families and to support the achievement of Sustainable Development Goal 4, namely quality education. This research employs a descriptive qualitative approach using Merilee S. Grindle's policy implementation model, which emphasizes policy content and implementation context. Data were collected through observation, interviews, and document analysis at UPTD Liponos Kalijudan as the implementing agency. The findings show that the program is designed to expand access to higher education through tuition assistance, dormitory facilities, living allowances, learning resources, and academic mentoring throughout the period of study. However, several implementation constraints remain, including limited beneficiary quotas, dependence on external actors, suboptimal data synchronization, and less effective inter-organizational coordination. Overall, the program has provided tangible benefits in broadening opportunities to pursue higher education and has the potential to serve as an instrument for breaking the intergenerational cycle of poverty. Nevertheless, stronger coordination, broader beneficiary coverage, and sustainable funding are still needed to ensure that policy objectives are achieved more optimally and equitably.

Keywords: policy implementation, One Family One Bachelor, access to higher education, SDG 4, Merilee S. Grindle

ABSTRAK

Akses terhadap pendidikan tinggi masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan sumber daya manusia, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Satu Kartu Keluarga Satu Sarjana di Kota Surabaya sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi keluarga kurang mampu serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan ke-4, yaitu pendidikan berkualitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, yang menitikberatkan pada isi kebijakan dan konteks implementasi. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi di UPTD Liponos

Kalijudan sebagai pelaksana program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini dirancang untuk memperluas akses pendidikan tinggi melalui pemberian bantuan biaya kuliah, fasilitas asrama, uang saku, sarana belajar, dan pendampingan akademik selama masa studi. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, antara lain keterbatasan kuota penerima, ketergantungan pada pihak eksternal, sinkronisasi data yang belum optimal, serta koordinasi antarpelaksana yang belum sepenuhnya efektif. Secara umum, program ini memberikan manfaat nyata dalam memperluas kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi dan berpotensi menjadi instrumen pemutus rantai kemiskinan antargenerasi. Meskipun demikian, penguatan koordinasi, perluasan cakupan penerima, dan keberlanjutan pendanaan masih diperlukan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara lebih optimal dan merata.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, Satu Kartu Keluarga Satu Sarjana, akses pendidikan tinggi, SDGs 4.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan upaya pembangunan atau usaha yang dilakukan oleh negara atau pemerintah untuk memperkuat masyarakat demokratis yang berdasar pada kelompok masyarakat kelas menengah terdidik yang akan menjadi pilar utama *civil society* (Herdiana & Komisatun, 2023). Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung pembangunan suatu bangsa karena melalui pendidikan, kompetensi sumber daya manusia dapat ditingkatkan, dan dapat menjadi salah satu cara untuk membentuk karakter bangsa dan menciptakan keadilan sosial (Panoyo, 2024). Selain itu, pendidikan merupakan hak dasar setiap manusia dan manusia berhak mendapatkan kesempatan untuk mengakses pendidikan yang sama di mata hukum tanpa adanya perbedaan (Rahmiati et al., 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan merupakan sebuah hal penting yang menjadi hak sekaligus kewajiban dengan dimensi konstitusional dalam Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 31 menegaskan bahwa pemerintah wajib menyediakan dan mengusahakan pendidikan bagi warganya sebagai usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan warganya wajib mengikuti pendidikan sekurang - kurangnya pendidikan dasarsistem ketatanegaraan di Indonesia, sehingga setiap warga memiliki kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang setara tanpa diskriminasi wilayah atau status sosial.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan pembangunan nasional dan dinamika global, pemerataan akses, dan kualitas pendidikan kini tercermin dalam kerangka pembangunan global melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) tujuan ke empat yang memastikan Pendidikan yang inklusif, berkualitas,, serta mendorong kesempatan belajar bagi semua orang, pendidikan tidak lagi dipandang berhenti pada jenjang dasar dan menengah, tetapi memerlukan Tingkat lanjutan hingga pendidikan tinggi (United Nations, 2015). Pendidikan tinggi merupakan sebuah bagian penting dalam mengembangkan potensi anak untuk menghasilkan Masyarakat yang berdaya saing dan menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (Abdillah 2024). Sehingga keberadaan pendidikan tinggi menjadi penting untuk meningkatkan kapasitas individu warga, dan menjadi dasar dalam

memperkuat daya saing bangsa serta mendorong pembangunan yang berkualitas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan akses yang adil dan merata terhadap pendidikan tinggi baik di tingkat nasional maupun daerah.

Gambar 1. Angka partisipasi perguruan tinggi di Indonesia



Sumber : Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi menurut Jenis Kelamin 2025. Badan Pusat Statistik (2025)

Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa angka partisipasi di Indonesia masih sangat kecil yakni 32,89% pada tahun 2025, masih jauh di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menetapkan APK sebesar 35 persen. Rendahnya angka partisipasi perguruan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni faktor ekonomi karena biaya pendidikan di jenjang perguruan tinggi dianggap mahal/tinggi. Selain itu distribusi perguruan tinggi dan program studi yang tidak merata juga menjadi alasan angka partisipasi perguruan tinggi masih rendah. Rendahnya angka partisipasi perguruan tinggi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor sekunder diantaranya adalah ketidaksiapan lulusan akademik SMA/SMK/MA, norma sosial yang kurang mendukung, dan minimnya informasi (Komunita, 2023).

Terdapat beberapa siswa tidak dapat menempuh pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dikarenakan berasal dari keluarga kurang mampu, selain itu kondisi ekonomi juga mempengaruhi pemikiran siswa dalam mengambil Keputusan (Purnamasari & Ardiansyah, 2025). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi tidak hanya menjadi hambatan dalam aspek pembiayaan tetapi juga mempengaruhi persepsi dan ekspektasi siswa untuk menentukan rencana di masa depan, sehingga dapat dikatakan bahwa rendahnya angka partisipasi perguruan tinggi dipengaruhi oleh pertimbangan rasional siswa terhadap kondisi ekonomi keluarga. Kondisi ini juga diperkuat dengan adanya temuan data yang menunjukkan hanya 1,8 juta siswa di Indonesia yang dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi disebabkan oleh kondisi ekonomi (Humairah & Wanusmawatie, 2025). Temuan – temuan tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor utama dalam mempengaruhi angka partisipasi pendidikan tinggi, selain itu faktor ekonomi juga mempengaruhi persepsi dan ekspektasi generasi muda terhadap rencana masa depan mereka sehingga sangat penting bagi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Berdasarkan permasalahan rendahnya angka partisipasi perguruan tinggi yang terjadi baik di tingkat global maupun nasional, penting untuk melihat bagaimana dinamika partisipasi pendidikan tinggi terjadi di level daerah. Di tingkat daerah, pemerintah memiliki peran yang krusial untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan Masyarakat. Kota Surabaya sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia memiliki kondisi ekonomi yang beragam, sehingga menjadikan Surabaya sebagai salah satu kota yang memerlukan sorotan lebih dari pemerintah terutama pemerintah daerah Jawa Timur untuk memastikan bahwa masyarakatnya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang tinggi. Hal ini menjadi penting karena meskipun Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia dan pusat pendidikan di Jawa Timur, belum semua warganya benar-benar dapat mengenyam pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Dalam buku indeks pembangunan manusia kota Surabaya tahun 2019 menyatakan bahwa hanya sebesar 17,75% penduduk Surabaya yang mempunyai ijazah perguruan tinggi (IPM, 2019). Temuan tersebut menunjukkan rendahnya partisipasi perguruan tinggi penduduk Surabaya. Rendahnya partisipasi tersebut terjadi karena kondisi ekonomi masyarakatnya yang beragam, sehingga penting bagi pemerintah untuk memberikan solusi atas tantangan ini.

Dalam upaya menangani kasus rendahnya angka partisipasi perguruan tinggi di Indonesia khususnya di Surabaya yang terjadi karena faktor ekonomi, pemerintah mengeluarkan inovasi program yakni Satu Keluarga Satu Sarjana yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2022. Program ini bertujuan untuk membantu meningkatkan akses pendidikan di jenjang perguruan tinggi bagi keluarga kurang mampu atau Masyarakat yang memiliki hambatan di bidang ekonomi. Dengan adanya program ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan angka partisipasi perguruan tinggi dan mencapai target yang telah ditentukan. Program ini telah berjalan di beberapa Kawasan daerah salah satunya Surabaya, implementasi program ini merupakan upaya pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan dengan meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Program ini juga merupakan awal dari bagian strategi pemerintah untuk Pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan sekaligus mendukung pemenuhan tujuan ke 4 dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) tentang pendidikan berkualitas.

Pelaksanaan program satu keluarga satu sarjana di Surabaya merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam memperluas kesempatan masyarakatnya untuk mengakses pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Program satu keluarga satu sarjana ini tidak hanya berfokus pada peningkatan angka partisipasi perguruan tinggi tetapi juga menekankan aspek keadilan sosial bagi masyarakatnya dengan memberikan kesempatan pendidikan bagi kalangan Masyarakat kurang mampu. Dengan dukungan yang diberikan pemerintah kepada Masyarakat di harap dapat mengurangi hambatan yang selama ini menjadi membatasi kalangan Masyarakat kurang mampu. Keberhasilan program ini berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat dalam

jangka Panjang. Dengan demikian, program ini tidak hanya menysasar aspek pendidikan, tetapi juga berkontribusi pada agenda pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Meskipun program Satu Kartu Keluarga Satu Sarjana ini merupakan program yang strategis untuk meningkatkan angka partisipasi perguruan tinggi, pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai permasalahan. Dalam implementasinya, program Satu Kartu Keluarga Satu Sarjana menghadapi adanya keterbatasan sarana dan prasana hingga ketidakoptimalan sumber daya manusia. Tidak hanya itu, dalam implementasinya program ini masih menghadapi kurangnya insentif sehingga menurunkan motivasi bagi pelaksana (Safira et al., 2025). Dalam wawancara Bersama dengan narasumber, narasumber menyatakah bahwa dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala diantaranya adalah ketidakpastian uang saku yang diberikan oleh pelaksana program kepada penerima program. Selain itu, dalam penelitian lain disebutkan bahwa terdapat kelemahan pada aspek sumber daya seperti adanya keterbatasan jumlah staff yang terlibat dalam pelaksanaan program sehingga pembagian kewenangan dan tanggung jawab tidak begitu jelas (Fitri & Novandri, 2022). Dalam wawancara Bersama narasumber juga disebutkan bahwa proses seleksi masih belum berjalan secara transparan, karena adanya gap pengetahuan antara pemerintah dan masyarakat dimana masyarakat tidak tau apakah namanya terdata atau tidak karena pemerintah tidak memberitahukan terlebih dahulu secara cepat. Selain itu, penelitian mengenai implementasi program satu kartu keluarga satu sarjana di Surabaya masih sangat terbatas, sehingga penting untuk dikaji Kembali secara mendalam untuk mengetahui sejauh mana program ini dapat mengatasi hambatan dan tantang yang mempengaruhi angka partisipasi perguruan tinggi di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan latar belakang serta permasalahan yang telah dikemukakan baik dari hasil penelitian terdahulu maupun wawancara langsung dengan narasumber, dapat dikatakan bahwa implementasi program Satu Kartu Keluarga Satu Sarjana di Surabaya masih menghadapi tantangan dan hambatan baik dari segi masyarakatnya maupun sumber daya yang kurang memadai. Oleh karena itu, penulis hendak melakukan analisis terhadap implementasi program Satu Keluarga Satu Sarjana di Surabaya dalam mendukung pendidikan berkualitas bagi warga Surabaya. "Implementasi Program Satu Kartu Keluarga Satu Sarjana: Upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam Mendukung Pendidikan Berkualitas" dipilih menjadi judul penelitian karena dinilai relevan dengan rumusan masalah yang ditetapkan. Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle. Grindle memandang implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan (*Content Of Policy*) dan konteks implementasi (*Context of Implementation*). Teori ini dinilai relevan untuk digunakan dalam menganalisis implementasi program Satu Kartu Keluarga Satu Sarjana di Surabaya karena dinilai mampu menjelaskan hubungan antara rancangan kebijakan dengan kondisi nyata penerapan di lapangan. Aspek isi kebijakan menekankan pada kepentingan yang mempengaruhi kebijakan, manfaat

yang diberikan, perubahan yang ingin dicapai, pengambilan keputusan, pelaksanaan program yang kompeten & kapabel serta sumber daya yang digunakan dalam mendukung berjalannya program tersebut, Disisi lain aspek implementasi menekankan pada kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor-aktor yang terlibat, karakteristik birokrasi, dan Tingkat kepatuhan serta respon pelaksana. Melalui teori ini, peneliti diharapkan dapat menganalisis implementasi program berdasarkan pelaksanaannya baik dari transparansi, ketepatan, monitoring, dan evaluasi. Dengan demikian, penggunaan teori ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi Program Satu Keluarga Satu Sarjana dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi serta mendukung pencapaian pendidikan berkualitas di Kota Surabaya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengeksplorasi secara mendalam implementasi program "Satu Kartu Keluarga Satu Sarjana" di Kota Surabaya. Pendekatan kualitatif ditekankan pada upaya untuk memahami makna, proses, serta konteks dari suatu fenomena melalui pengumpulan data yang bersifat alami, mengingat pendekatan ini merupakan instrumen untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala atau fenomena sentral (Creswell, 2008, sebagaimana dikutip dalam Semiawan, 2010). Sejalan dengan hal tersebut, penggunaan metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan suatu kondisi, peristiwa, atau fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai karakteristik objek, kelompok, maupun individu tertentu (Nazir, 1999). Lokasi penelitian difokuskan pada Dinas Sosial Kota Surabaya dan UPTD Lingkungan Pondok Sosial (Linsos) Kalijudan untuk memahami dinamika pelaksanaan program serta peran masing-masing lembaga di lapangan. Peneliti hadir langsung sebagai instrumen utama untuk berinteraksi dengan informan dan subjek penelitian yang berkaitan erat dengan kebijakan tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum dan terbuka untuk memperoleh informasi yang mendalam, serta didukung oleh observasi lapangan dan studi dokumen guna mendapatkan gambaran faktual mengenai kendala dan proses kebijakan. Akhirnya, teknis analisis data dilakukan secara deskriptif untuk memberikan interpretasi yang tepat terhadap fakta-fakta yang ditemukan sehingga dapat mengungkap realitas implementasi program secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Satu Kartu Keluarga Satu Sarjana di kota Surabaya dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang membutuhkan kerja sama antara Dinas Sosial kota Surabaya dengan pelaksana di lapangan serta dengan perguruan tinggi. Pelaksanaan program Satu Kartu Keluarga Satu Sarjana dilaksanakan dengan selektif dan proaktif melalui metode jemput bola. Pemerintah melalui Dinas Sosial dan UPTD melakukan survey dan pendataan terhadap keluarga miskin di Surabaya

dengan mengacu pada indikator tertentu yakni kondisi tempat tinggal, penghasilan, dan kepemilikan aset.

Program ini secara spesifik menyoal pada anak dari keluarga kurang mampu yang telah duduk di bangku 3 Sekolah Menengah Atas (SMA), yang selanjutnya diberikan penawaran untuk mengikuti program secara sukarela. Bagi anak yang bersedia, proses dilanjutkan dengan mendaftarkan anak tersebut ke perguruan tinggi swasta yang telah bekerja sama (CSR) dan menempatkan anak di asrama yang telah disediakan. Namun, temuan di lapangan menunjukkan adanya permasalahan dalam proses pendataan dimana, terdapat anak yang mendapatkan program tersebut di pendataan namun tidak mendapatkan pemberitahuan sehingga anak tersebut tidak mengambil benefit yang diberikan. Selama masa studi perguruan tinggi, mahasiswa yang menerima program satu kartu keluarga satu sarjana tinggal di asrama dengan system pembinaan dan pengawasan intensif serta mendapatk dukungan fasilitas dan kebutuhan dasar seperti internet, ruang belajar, makanan dan minuman, uang saku serta beberapa pelatihan. Akan tetapi, keberlanjutan program ini sangat bergantung pada kerja sama dengan pihak lain seperti yayasan dalam hal anggaran dan perguruan tinggi swasta tanpa adanya kerja sama dengan pihak tersebut maka pelaksanaan program ini juga terhenti

Program Satu Kartu Keluarga Satu Sarjana dirancang untuk menyoal kelompok Masyarakat kurang mampu sebagai sasaran utama dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia sehingga menurunkan angka kemiskinan di kota Surabaya. Namun cakupan program masih terbatas karena program ini hanya mampu menampung beberapa keluarga miskin saja, sehingga tidak semua keluarga kurang mampu dapat menerima program ini, terutama bagi keluarga yang belum atau tidak memenuhi kriteria dan tidak bersedia mengikuti sistem asrama sebagai syarat penerimaan program Satu Kartu Keluarga Satu Sarjana. Dari segi manfaat program ini memberikan dukungan bagi penerima bantuan berupa akses layanan pendidikan tinggi, pembiayaan pendidikan tinggi, uang saku, penyediaan tempat tinggal, konsumsi harian bagi penerima program, fasilitas belajar seperti internet, komputer, hingga ruang belajar di asrama.

Dukungan ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat secara signifikan. Program ini bertujuan untuk memberikan manfaat jangka Panjang bagi penerima manfaat agar kualitas hidup di masa depan meningkat dan menjadi lebih baik dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Namun dalam wawancara bersama dengan pihak UPTD yakni bu Vero, beliau mengatakan bahwa dampak nyata dari program ini belum bisa di ukur secara langsung karena penerapan program Satu Kartu Keluarga Satu Sarjana baru dilaksanakan beberapa tahun kebelakang ini dan penerima manfaat belum lulus dan masih dalam masa studi. Efektivitas implementasi program ini sangat bergantung pada kualitas koordinasi vertikal antara Dinas Sosial sebagai regulator dengan UPTD Liponsos sebagai eksekutor di lapangan. Sinkronisasi data menjadi titik krusial, mengingat program ini melibatkan pihak eksternal (PTS) dalam penyediaan beasiswa.

Ketidaksinkronan jadwal akademik kampus dengan proses verifikasi internal di dinas berpotensi menimbulkan jeda waktu yang menghambat percepatan penyaluran manfaat.

Pembahasan

Content of Policy

Program Satu Kartu Keluarga Satu Sarjana disusun sebagai upaya untuk membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat yang selama ini terkendala faktor ekonomi. Kebijakan ini berangkat dari pandangan bahwa pendidikan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup. Sasaran utamanya adalah keluarga yang belum memiliki anggota dengan pendidikan sarjana. Fokus tersebut menunjukkan bahwa program memang diarahkan pada kelompok yang membutuhkan intervensi secara langsung.

Program ini tidak hanya memberikan bantuan biaya pendidikan kepada penerima manfaat. Peserta juga memperoleh dukungan lain seperti tempat tinggal dan kebutuhan penunjang selama masa studi. Bantuan yang diberikan bersifat menyeluruh sehingga mampu mengurangi beban ekonomi secara signifikan. Kondisi ini membuat penerima memiliki peluang yang lebih besar untuk menyelesaikan pendidikan.

Pelaksanaan program ini juga diarahkan untuk menghasilkan perubahan dalam jangka panjang. Pendidikan tinggi dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan peluang kerja dan taraf hidup masyarakat. Dampak yang diharapkan tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga keluarganya. Perubahan ini menjadi salah satu tujuan utama dari kebijakan yang dijalankan.

Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Setiap pihak memiliki peran masing-masing dalam menjalankan tahapan program dari pendataan hingga evaluasi. Keterlibatan banyak aktor membuat pelaksanaan program membutuhkan koordinasi yang intens. Jika dikaitkan dengan model implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle, kondisi ini menunjukkan bahwa isi kebijakan mencakup aspek sasaran, manfaat, perubahan yang diinginkan, serta pelaksana program.

Context of Policy

a. Power, Interests, and Strategies of Actors (Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor)

Indikator ini menggambarkan seberapa jauh para pihak yang terlibat memiliki komitmen, kepentingan, dan rencana untuk mendukung kelangsungan program. Beberapa pihak penting yang terlibat dalam pelaksanaan Program Satu Kartu Keluarga Satu Sarjana di Kota Surabaya antara lain Dinas Sosial Kota Surabaya sebagai pengatur, UPTD Liponsos Kalijudan sebagai pelaksana teknis, Yayasan Bakti Persatuan sebagai penyokong dana, dan perguruan tinggi swasta yang terlibat dalam program CSR.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa kelurahan dan Dinas Sosial sangat berkomitmen untuk mendukung program tersebut, seperti terlihat dari proses

pendataan yang dilakukan dengan pendekatan langsung. Untuk memastikan bahwa penerima manfaat yang ditargetkan tepat, Dinas Sosial bekerja sama dengan UPTD melakukan survei ke masyarakat dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pendapatan, tempat tinggal, dan kepemilikan aset. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pelaksana benar-benar ingin membantu kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Namun, kelangsungan program sangat tergantung pada partisipasi dari pihak eksternal, khususnya perguruan tinggi swasta. Apabila kolaborasi dengan pihak tersebut tidak dilanjutkan, pelaksanaan program juga akan terhenti karena ketergantungan ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat sepenuhnya bertanggung jawab atas pelaksanaan program; oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih mandiri dan berkelanjutan untuk mencegah program bergantung sepenuhnya pada sumber daya dari luar.

b. Institution and Regime Characteristics (Karakteristik Institusi)

Indikator ini menunjukkan bagaimana cara organisasi birokrasi, proses pelaporan, dan kapasitas institusi berperan dalam efektivitas pelaksanaan program. UPTD Liponsos Kalijudan sebagai lembaga pelaksana teknis memiliki susunan organisasi yang jelas, dipimpin oleh Kepala UPTD dengan dukungan tim teknis untuk verifikasi dan pemantauan. Fasilitas operasional seperti ruang untuk pelayanan publik, ruang arsip data terpadu, dan fasilitas kerja lainnya juga mendukung kelancaran administrasi program.

Temuan di lapangan mengungkapkan adanya kendala dalam sinkronisasi antara Dinas Sosial yang berfungsi sebagai pengatur dan UPTD yang bertugas sebagai pelaksana. Ketidakcocokan jadwal akademik perguruan tinggi dengan proses verifikasi internal dinas berpotensi menimbulkan keterlambatan dan menghambat distribusi manfaat program kepada para penerima. Selain itu, terdapat situasi di mana anak yang telah terdaftar sebagai penerima justru tidak mendapatkan informasi, yang mengakibatkan mereka kehilangan manfaat seharusnya. Situasi ini menunjukkan bahwa saluran komunikasi institusi perlu diperbaiki, terutama untuk informasi yang disampaikan dari tingkat dinas ke penerima manfaat.

Dengan demikian, meskipun struktur dan fasilitas lembaga pelaksana program sudah cukup baik, tetap ada isu yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program tersebut.

c. Compliance and Responsiveness (Kepatuhan dan Responsivitas)

Indikator ini mencerminkan sejauh mana pelaksana program mengikuti pedoman teknis yang ada serta seberapa cepat mereka menanggapi perubahan di lapangan, termasuk tanggapan dari kelompok yang menjadi sasaran.

Berdasarkan temuan di lapangan, pelaksanaan program ini telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pelaksana, meliputi proses pengumpulan data, seleksi calon penerima, pendaftaran ke institusi pendidikan mitra, penempatan di asrama, dan penyediaan fasilitas yang mendukung selama periode studi. Ini menunjukkan bahwa pihak pelaksana telah menunjukkan

kepatuhan administratif yang cukup baik terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, yang merupakan dasar hukum program ini.

Tanggapan masyarakat terkait sosialisasi program dinilai cukup positif. Hampir seluruh calon penerima yang ditawarkan program tersebut bersedia untuk mengikuti prosedur dengan sukarela, termasuk memenuhi syarat tinggal di asrama. Namun, sistem asrama menjadi salah satu kendala, karena beberapa keluarga yang seharusnya memenuhi syarat secara ekonomi untuk menjadi penerima program justru enggan untuk bergabung, sehingga jumlah keluarga yang menerima manfaat dari program menurun. Hal ini menunjukkan bahwa responsivitas kebijakan perlu ditingkatkan agar lebih banyak keluarga yang membutuhkan dapat terjangkau

Faktor Pendukung dan Penghambat

Keberhasilan pelaksanaan Program Satu Kartu Keluarga Satu Sarjana tidak terlepas dari adanya faktor pendukung yang kuat. Salah satu faktor utama adalah komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program secara berkelanjutan. Dukungan ini terlihat dari adanya pengelolaan program yang terstruktur dan sistematis. Kondisi tersebut membantu program berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Selain itu, ketersediaan fasilitas bagi penerima manfaat juga menjadi faktor penting. Bantuan yang diberikan mencakup biaya pendidikan, tempat tinggal, serta kebutuhan pendukung lainnya. Fasilitas tersebut membantu mengurangi beban ekonomi sehingga peserta dapat lebih fokus dalam menjalani pendidikan. Kerja sama dengan berbagai pihak, terutama perguruan tinggi, juga menjadi faktor pendukung yang signifikan. Kolaborasi ini memungkinkan program dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Selain itu, kerja sama tersebut membantu pemerintah dalam mengatasi keterbatasan sumber daya. Sinergi antar aktor memperkuat pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Di sisi lain, pelaksanaan program juga menghadapi beberapa kendala. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan jumlah penerima dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan tidak semua calon penerima dapat terakomodasi dalam program. Keterbatasan ini masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan.

Kendala lain yang muncul berkaitan dengan proses pendataan dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Kurangnya koordinasi antar pelaksana menyebabkan informasi tidak selalu tersampaikan secara merata. Akibatnya, sebagian masyarakat tidak dapat memanfaatkan program secara optimal. Permasalahan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek komunikasi. Selain itu, ketergantungan terhadap pihak eksternal juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan program. Keberlanjutan program sangat dipengaruhi oleh kerja sama dengan mitra seperti perguruan tinggi dan lembaga pendukung. Jika kerja sama tidak berjalan optimal, maka pelaksanaan program dapat terganggu. Hal ini menunjukkan pentingnya stabilitas hubungan antar lembaga.

Secara keseluruhan, faktor pendukung dan penghambat tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai aspek yang

saling berkaitan. Unsur seperti sumber daya, komunikasi, serta koordinasi memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan program. Apabila aspek-aspek tersebut tidak berjalan dengan baik, maka pelaksanaan kebijakan akan terhambat. Dalam kerangka model implementasi menurut Merilee S. Grindle, kondisi ini berkaitan dengan konteks pelaksanaan yang memengaruhi keberhasilan kebijakan.

Keterkaitan Dengan SDGs 4

SDGs 4 menekankan akan pentingnya pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas bagi semua. Program satu kartu keluarga satu sarjana ini berkontribusi terhadap goal tersebut melalui tiga faktor. Pertama, memperluas akses ke pendidikan tinggi bagi keluarga yang kurang mampu dengan memberikan pembiayaan penuh untuk semua biaya kuliah, tempat tinggal, makanan, uang saku, dan fasilitas belajar. Kedua, mewujudkan keadilan sosial dengan menyasar keluarga miskin yang belum memiliki anggota keluarga bergelar sarjana. Dengan melakukan ini, prinsip "tidak ada yang tertinggal" akan diterapkan. Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan keterampilan kerja yang komprehensif dan pelatihan selama masa studi

Namun, karena sebagian besar penerima manfaat masih sedang dalam masa studi, dampak nyata program ini belum dapat diukur secara empiris. Oleh karena itu, untuk mengukur secara menyeluruh kontribusi program ini terhadap pencapaian SDGs Tujuan 4, diperlukan sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Program Satu Kartu Keluarga Satu Sarjana di Surabaya secara umum menunjukkan kinerja yang cukup efektif dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi, khususnya bagi keluarga kurang mampu. Program ini mampu memperluas kesempatan pendidikan melalui kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta, yang didukung oleh sistem pendataan dan seleksi yang bersifat proaktif. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan anggaran, hambatan administratif, serta kurang optimalnya sosialisasi yang berdampak pada keberlanjutan dan jangkauan program. Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat serta komitmen dari para pemangku kepentingan yang terlibat. Secara keseluruhan, program ini memberikan dampak positif jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Surabaya. Dilihat dari aspek isi kebijakan, program ini telah dirancang sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, yaitu keluarga yang belum memiliki anggota berpendidikan sarjana, serta memberikan manfaat yang komprehensif dalam mengurangi beban ekonomi dan mendorong peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan, meskipun keterbatasan kuota masih menjadi kendala dalam pemerataan penerima manfaat. Dari perspektif konteks implementasi, efektivitas program dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai aktor, namun masih terdapat ketergantungan pada pihak eksternal, kendala koordinasi,

serta masalah komunikasi dan sinkronisasi data yang menghambat pelaksanaan. Sementara itu, dalam aspek kepatuhan dan responsivitas, program telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan memperoleh respon positif dari masyarakat, meskipun persyaratan sistem asrama menjadi hambatan bagi sebagian calon penerima sehingga diperlukan kebijakan yang lebih fleksibel untuk memperluas jangkauan program. Secara keseluruhan, implementasi Program Satu Kartu Keluarga Satu Sarjana telah berkontribusi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya pada bidang pendidikan berkualitas, melalui peningkatan akses pendidikan tinggi dan pengurangan hambatan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu. Akan tetapi, dampak jangka panjang program belum dapat dinilai secara optimal karena sebagian besar penerima masih menjalani masa studi, sehingga diperlukan evaluasi berkelanjutan guna mengukur efektivitas program secara menyeluruh. Berdasarkan temuan penelitian, program ini dapat dikategorikan cukup efektif, namun masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis, seperti keterbatasan cakupan penerima, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta ketergantungan terhadap pihak eksternal. Oleh karena itu, meskipun program ini tetap relevan sebagai instrumen kebijakan dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi, diperlukan upaya optimalisasi melalui perbaikan manajemen, penguatan komunikasi, serta peningkatan keberlanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas, merata, dan berkesinambungan di masa mendatang. Berdasarkan hasil analisis terhadap implementasi Program Satu Keluarga Satu Sarjana di Surabaya yang menunjukkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya, penulis merumuskan sejumlah saran strategis yang dapat dipertimbangkan oleh UPTD Liponsos Kalijudan sebagai pelaksana program. Rekomendasi ini diharapkan mampu mendukung terciptanya program yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, khususnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu terhadap akses pendidikan tinggi. Adapun saran yang diajukan adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana, pemerintah bersama pihak terkait perlu meningkatkan alokasi anggaran serta mengembangkan inovasi berbasis teknologi agar pemanfaatan fasilitas yang tersedia dapat lebih optimal. (2) Dalam menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, diperlukan upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan bagi para pelaksana program, sehingga kinerja dapat berjalan lebih efektif dan profesional. (3) Untuk meningkatkan motivasi kerja pelaksana, perlu dilakukan penyesuaian dan perbaikan sistem insentif yang seimbang dengan beban kerja dan capaian kinerja, sehingga dapat mendorong peningkatan komitmen dalam pelaksanaan program. (3) Dalam rangka memperluas cakupan penerima manfaat, perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan kriteria seleksi, serta memperluas kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan lembaga sosial, guna meningkatkan jumlah peserta yang dapat dijangkau oleh program.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdillah, F. (2024). Peran perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. *Pendidikan: Jurnal Multidisiplin*, 1(1), 13-24. doi:10.37985/educazione.v1i1.4
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) menurut jenis kelamin*. Diperoleh dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ0NiMy/angka-partisipasi-kasar--apk--perguruan-tinggi--pt--menurut-jenis-kelamin.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2020). *Indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Surabaya tahun 2019*. Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. <https://surabayakota.bps.go.id>
- Fitri, U., & Novandri, R. (2022). Implementasi kebijakan program satu keluarga satu sarjana sebagai langkah penanggulangan kemiskinan di Kota Pariaman. *Journal of Election and Leadership (JOELS)*, 3(2), 93-101. <https://doi.org/10.31849/joels.v3i2.10571>
- Herdiana, A. T., & Khomisatun, A. (2024). Pembangunan pendidikan berkualitas dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan (SDGs) (pdf). IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Humairah, S. F., & Wanusmawatie, I. (2025). Kebijakan pinjaman mahasiswa sebagai alternatif pembiayaan pendidikan tinggi di Indonesia: Tinjauan ekonomi politik. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 23344-23350. doi:10.31004/jptam.v9i2.30328
- Komunita Widyatama. (2025, 21 Oktober). *Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi: Cermin Akses Pendidikan Tinggi dan Masa Depan Indonesia*. Diperoleh dari <https://komunita.widyatama.ac.id/angka-partisipasi-kasar-perguruan-tinggi-cermin-akses-pendidikan-tinggi-dan-masa-depan-indonesia/>
- Nazir. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Panoyo. (2024). Pendidikan sebagai Pilar Pembangunan Bangsa Indonesia Menuju Masa Depan Berkelanjutan. *Jurnal Studi Pendidikan Dasar*, 2(1), 33-44. <https://doi.org/10.54180/jsped.v2i1.499>
- Pemerintah Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/196151/uu-no-04-tahun-2022>
- Purnamasari, G. N., & Ardiansyah, H. (2025). Kajian literatur tentang pengaruh faktor sosial dan ekonomi terhadap minat siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 15674-15685. doi:10.31004/jptam.v9i2.28051
- Rahmiati, R., Firman, F., & Ahmad, R. . (2021). Implementasi Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5 (3), 10160-10165. <https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2594>
- Safira, F. D., Ardini, H. R., Anggraeni, A. A., Maharani, N. S., & Reviandani, O. (2025). Implementasi program 1 kartu keluarga 1 sarjana di Kota Surabaya.

Future: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik.

<http://ejournal.sagita.or.id/index.php/future/article/view/505>

United Nations. (n.d.). *Goal 4: Quality education*. Retrieved May 12, 2026, from

<https://sdgs.un.org/goals/goal4> (sdgs.un.org)